



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	22 (<i>dua puluh dua</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Juli 2020
Pukul	:	19.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	<i>Review</i> Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), Budi Harto, 3. Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zein, 4. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Arief Mulyadi, 5. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Robertus Bilitea, dan 6. Direktur Utama PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), Hery S. Soewandi, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 19.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 14 Juli 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

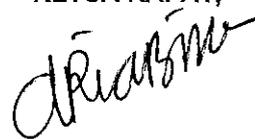
II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Penyertaan Modal Negara pada PT Utama Karya (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp3.500.000.000.000,-** (*tiga triliun lima ratus miliar rupiah*) yang digunakan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera.
2. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp5.000.000.000.000,-** (*lima triliun rupiah*) yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor pembangkit, transmisi dan distribusi, termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa.
3. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Penyertaan Modal Negara kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun Anggaran 2020, sebesar **Rp1.000.000.000.000,00** (*satu triliun rupiah*) yang akan disalurkan kepada nasabah perempuan pra-sejahtera PNM Mekaar melalui pembiayaan dengan pembinaan dan pendampingan.
4. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp268.016.051.694,00** (*dua ratus enam puluh delapan miliar enam belas juta lima puluh satu ribu, enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dari konversi pokok pinjaman SLA919/DP3/1996, dengan tujuan agar dapat membantu meningkatkan investasi khususnya sektor industri skala kecil dan mendorong perkembangan ekonomi Indonesia melalui jaringan Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
5. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Penyertaan Modal Negara kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp3.762.784.065.600,00** (*tiga triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) untuk Pengembangan Perseroan melalui Konversi Utang Pokok *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan Penghapusan Utang SLA Non pokok.
6. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Penyertaan Modal Negara BUMN Tahun 2020 kepada PT Utama Karya (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.48 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA
A-189